

## **Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Orde Baru**

Azzahra Fhadilla<sup>1\*</sup>, Hanis Endang Lestari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Jambi

\*Corresponding author, e-mail: [azzahrafhadilla99@gmail.com](mailto:azzahrafhadilla99@gmail.com)

### **Abstrak**

Kajian ini mengulas arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru dengan fokus pada dua isu pokok, yakni penanganan Timor Timur dan strategi diplomasi di tengah rivalitas Perang Dingin. Pemilihan topik ini penting karena memperlihatkan bagaimana politik luar negeri dijadikan sarana menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa politik luar negeri Orde Baru lebih bercorak pragmatis, dengan orientasi utama pada kepentingan rezim dibanding penerapan ideal prinsip bebas aktif. Penelitian dilakukan melalui metode studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi Timor Timur ditempuh melalui kombinasi operasi militer dan diplomasi, sementara dalam konteks Perang Dingin, Indonesia mengimbangi kedekatan dengan blok Barat dengan keterlibatan aktif di ASEAN dan Gerakan Non-Blok. Kesimpulannya, politik luar negeri Orde Baru berperan sebagai instrumen untuk mendukung stabilitas rezim serta agenda pembangunan nasional.

Kata Kunci: ASEAN; Non Blok; Politik.

### **Abstract**

This study reviews the direction of Indonesia's foreign policy during the New Order period by focusing on two main issues, namely the handling of East Timor and diplomacy strategies in the midst of Cold War rivalries. The selection of this topic is important because it shows how foreign policy is used as a means of maintaining internal stability while strengthening Indonesia's position in the international arena. The hypothesis put forward is that the New Order's foreign policy is more pragmatic, with the main orientation on the interests of the regime rather than the application of the ideal of the free and active principle. The research was conducted through literature study methods and descriptive analysis of relevant academic sources. The results show that East Timor's integration was achieved through a combination of military operations and diplomacy, while in the context of the Cold War, Indonesia balanced its proximity to the Western bloc with active involvement in ASEAN and the Non-Aligned Movement. In conclusion, the New Order foreign policy plays an instrument to support regime stability and the national development agenda.

Keywords: ASEAN; Non Block; Politic.

How to Cite: Fhadilla, A. & Lestari, H. E. (2026). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Orde Baru. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(3), 134-140.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©20256 by author.

## Pendahuluan

Masa Orde Baru merupakan babak penting dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia, ditandai oleh kompleksitas tantangan diplomatik yang harus dihadapi pemerintah. Di antara isu-isu utama yang muncul, persoalan Timor Timur menempati posisi sentral. Pemerintah Indonesia, melalui pendekatan diplomasi yang agresif dan sistematis, berupaya mengamankan legitimasi internasional atas tindakan militer dan integrasi wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia. Pendekatan ini mencakup manuver diplomatik di berbagai forum, mulai dari kawasan Asia Tenggara, Gerakan Non-Blok, hingga lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Strategi ini dikenal sebagai counter-revolutionary diplomatic offensive, yakni sebuah kampanye diplomasi terorganisir untuk mempresentasikan intervensi di Timor Timur sebagai langkah sah dalam kerangka stabilitas dan kedaulatan nasional. (Fibiger 2020) Namun, strategi tersebut menghadapi tantangan besar ketika sorotan internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin menguat, terutama setelah Peristiwa Dili pada tahun 1991. Tragedi tersebut memperburuk persepsi internasional terhadap Indonesia dan memperlemah posisi diplomatiknya, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai forum internasional lain. Diplomasi Indonesia, yang semula cukup berhasil mempertahankan narasi integrasi, mulai kehilangan pengaruh karena tekanan dari (Sadewa, D. P., & Hakiki 2023a) komunitas global yang mengedepankan isu HAM. (Ayu, R., & Winarno 2021).

Di sisi lain, dalam konteks global yang lebih luas, kebijakan luar negeri Indonesia selama Perang Dingin dibingkai melalui prinsip bebas-aktif. Prinsip ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak memihak kekuatan besar manapun baik Blok Barat maupun Blok Timur namun tetap aktif dalam memainkan peran diplomatik dan menjaga kepentingan nasional. Melalui partisipasi aktif dalam Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia berupaya menjaga kestabilan kawasan dan memperkuat kerjasama strategis di tingkat global tanpa terjebak dalam konflik ideologis dua kutub besar dunia. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan kemandirian politik luar negeri, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun citra Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berdaulat dan rasional dalam percaturan internasional. (Sadewa, D. P., & Hakiki 2023b).

Selain itu, pendekatan Indonesia terhadap diplomasi pertahanan selama Perang Dingin juga menunjukkan keterpaduan antara aspek militer dan diplomasi. Upaya memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara lain dilakukan secara pragmatis dan strategis untuk menjaga keseimbangan kekuatan regional dan

mengamankan posisi tawar Indonesia di tengah rivalitas global. Inisiatif-inisiatif ini, meskipun dipengaruhi oleh dinamika geopolitik saat itu, tetap berlandaskan pada kepentingan nasional jangka panjang dan prinsip non-aliansi yang konsisten.(Mangkusubroto 2025) dua isu besar yakni penanganan Timor Timur dan strategi kebijakan luar negeri selama Perang Dingin menjadi cerminan daribagaimana Orde Baru merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk memperoleh legitimasi internasional, menjaga integritas wilayah,serta memperkuat stabilitas dan kedaulatan negara dalam lanskap global yang penuh tekanan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan mengandalkan sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku sebagai data utama. Peneliti mengumpulkan literatur yang relevan dan kredibel melalui pencarian di perpustakaan digital, database akademik, dan katalog perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan terpercaya terkait topik penelitian. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut dikritisi secara teliti untuk menilai keakuratan dan relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang telah tervalidasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan membangun argumen historis yang sistematis dan objektif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Timor Timur pada Masa Orde Baru**

Ketika Portugal menarik diri dari Timor Portugis pada awal 1970-an, wilayah ini segera dilanda perebutan pengaruh di antara berbagai kelompok politik lokal. Salah satu yang paling menonjol adalah Fretilin, organisasi yang dianggap memiliki kecenderungan kiri dan dekat dengan ideologi komunis. Situasi ini dipandang berbahaya oleh pemerintahan Orde Baru yang baru saja mengalami trauma politik akibat peristiwa 1965. Keberadaan kekuatan berhaluan kiri di perbatasan timur Nusantara dipersepsikan sebagai ancaman langsung bagi stabilitas nasional dan keamanan rezim Soeharto. Karena itulah, persoalan Timor Timur tidak hanya dipandang sebagai isu regional semata, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan dan politik luar negeri Indonesia.(Arif 2013)Pemerintah Orde Baru kemudian mengambil dua langkah besar untuk menghadapi persoalan ini. Pertama adalah penggunaan kekuatan militer. Pada 7 Desember 1975, dilancarkan Operasi Seroja, yaitu pengiriman pasukan besar-besaran ke Timor Timur dengan dalih membantu proses integrasi. Dalam pandangan rezim

Soeharto, langkah ini merupakan cara untuk mencegah berdirinya sebuah negara kecil pro-komunis yang berpotensi menjadi pintu masuk pengaruh asing yang tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia. Kedua adalah jalur diplomasi. Karena invasi tersebut menuai kecaman internasional, pemerintah melancarkan serangkaian manuver diplomatik untuk memperoleh legitimasi atas tindakan integrasi. Strategi ini sebagai sebuah *diplomatic counter-revolution*, yaitu upaya diplomasi yang tidak hanya bertujuan meredam kritik, melainkan membentuk narasi baru di level global. Indonesia menggolongkan dukungan dari negara-negara ASEAN, kelompok Non-Blok, serta melakukan pendekatan kepada negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia. Bagi Washington dan Canberra, stabilitas kawasan lebih penting dibanding isu hak menentukan nasib sendiri, sehingga meskipun ada kritik moral, mereka tetap menoleransi langkah Indonesia. Dukungan tersebut membuat posisi Indonesia relatif kuat di arena internasional. (Fibiger 2020) Selain lewat jalur negara, pemerintah Orde Baru juga berusaha mengelola opini publik internasional. Media global dan komunitas bisnis menjadi sasaran diplomasi, dengan cara menampilkan citra bahwa Indonesia adalah negara stabil dan ramah investasi. Hal ini cukup efektif, karena meskipun ada kritik dari lembaga internasional maupun negara-negara Nordik, Indonesia tetap diterima sebagai mitra strategis di kawasan.

Dengan demikian, diplomasi dan militer berjalan beriringan: militer menjaga integrasi secara *de facto*, sementara diplomasi berfungsi memperkuat legitimasi *de jure*. Namun, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya berhasil menutup masalah. Gerakan perlawanan Fretilin tetap bertahan di Timor Timur, sementara di luar negeri, kelompok diaspora Timor Timur aktif mengkampanyekan isu pelanggaran HAM. Peristiwa penembakan Santa Cruz pada 1991 menjadi titik balik, karena liputan luas media internasional membuat perhatian dunia kembali tertuju pada Timor Timur dan menciptakan tekanan lebih besar terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, diplomasi Orde Baru mulai kehilangan daya tahannya. Akhirnya, ketika Soeharto lengser pada 1998 dan rezim Orde Baru runtuh, posisi Indonesia melemah. Di bawah Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengubah pendekatan dengan menawarkan referendum yang kemudian menghasilkan keputusan rakyat Timor Timur untuk merdeka pada 1999. Dengan demikian, strategi militer-diplomatik Orde Baru yang bertahan selama dua dekade lebih berhasil menunda kemerdekaan Timor Timur, namun tidak mampu menghapus aspirasi tersebut secara permanen.

### **Strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi Perang Dingin selama masa Orde Baru**

Pada periode Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, arah politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh realitas Perang Dingin yang memecah dunia ke dalam dua blok besar yaitu blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Di tengah situasi tersebut, pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, meskipun implementasinya mengalami penyesuaian dengan kepentingan rezim. Prinsip “bebas” dipahami sebagai sikap tidak terikat secara ideologis pada salah satu blok, sedangkan “aktif” dimaknai sebagai keterlibatan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Dalam praktiknya, Orde Baru menjadikan politik luar negeri sebagai instrumen untuk menopang pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri. (Sadewa, D. P., & Hakiki 2023a) Pendekatan politik luar negeri Orde Baru bersifat pragmatis. Pemerintah melihat bahwa hubungan baik dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki citra internasional Indonesia setelah peristiwa 1965 sekaligus membuka akses terhadap investasi dan bantuan ekonomi. Karena itu, hubungan diplomatik dengan dunia Barat yang sempat renggang pada masa Demokrasi Terpimpin kembali diperbaiki. Dukungan dari negara-negara Barat serta lembaga internasional dipandang penting untuk pemulihan perekonomian nasional pasca-krisis politik. (Kusuma, T., & Afwan 2022a) Namun, hubungan dengan Tiongkok justru mengalami pembekuan sejak 1967. Pemerintah Orde Baru menilai bahwa Beijing memiliki keterkaitan dengan aktivitas Partai Komunis Indonesia, sehingga hubungan diplomatik diputus sebagai langkah politik luar negeri yang sekaligus mencerminkan dinamika domestik. Meski demikian, Indonesia tidak sepenuhnya menutup diri dari Uni Soviet, tetapi interaksi lebih dibatasi. Hal ini menunjukkan strategi Orde Baru yang tetap menjaga jarak dengan blok Timur, namun tidak serta-merta meninggalkan jalur komunikasi internasional. (Pradana 2016) Selain mempererat hubungan dengan Barat, Indonesia juga mendorong kerja sama regional melalui pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Organisasi ini menjadi wadah penting untuk mengurangi ketegangan politik pasca Konfrontasi dengan Malaysia sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin kawasan Asia Tenggara. Peran ini kian relevan mengingat situasi Perang Dingin menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang rawan konflik. Melalui ASEAN, Indonesia berusaha membangun stabilitas regional yang mendukung pembangunan nasional. (Kusuma, T., & Afwan 2022b)

Dalam skala global, Indonesia tetap menunjukkan komitmen pada Gerakan Non-Blok (GNB). Keterlibatan aktif di dalamnya menjadi sarana diplomasi untuk menegaskan bahwa, meski secara ekonomi dekat dengan Barat, Indonesia tetap konsisten menjaga identitasnya sebagai bagian dari Dunia Ketiga yang memperjuangkan dekolonisasi, perdamaian, serta kemandirian pembangunan. GNB juga berfungsi sebagai arena bagi Indonesia untuk memperlihatkan bahwa prinsip bebas aktif tidak hanya slogan, tetapi juga diterapkan dalam forum internasional. (Sadewa, D. P., & Hakiki 2023a) Dengan demikian, strategi diplomasi Indonesia selama Perang Dingin pada masa Orde Baru merupakan kombinasi antara pragmatisme dan idealisme. Di satu sisi, pemerintah memanfaatkan kedekatan dengan Barat demi tujuan pembangunan dan stabilitas rezim. Di sisi lain, Indonesia tetap aktif di ASEAN dan GNB sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip bebas aktif serta untuk mempertahankan citra sebagai negara yang tidak tunduk pada kepentingan salah satu blok kekuatan dunia.

### **Kesimpulan**

Arah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru memperlihatkan corak pragmatis yang bertumpu pada kebutuhan stabilitas politik dan pembangunan nasional, namun tetap berusaha mempertahankan semboyan bebas aktif. Dalam persoalan Timor Timur, pemerintah menerapkan strategi ganda: operasi militer lewat Operasi Seroja untuk memastikan kontrol teritorial, serta diplomasi internasional untuk mencari legitimasi atas integrasi. Dukungan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Australia, sempat memperkuat posisi Indonesia, tetapi perlawanan Fretilin dan tekanan dunia internasional membuat masalah ini terus berlarut hingga akhirnya Timor Timur resmi merdeka pada 1999. Dalam konteks Perang Dingin, Orde Baru menata ulang hubungan luar negeri dengan mendekat ke Barat untuk memperoleh dukungan ekonomi, memutus hubungan dengan Tiongkok karena faktor domestik, serta tetap menjaga komunikasi terbatas dengan blok Timur. Pada saat yang sama, Indonesia mendorong kerja sama kawasan melalui ASEAN dan tetap aktif dalam Gerakan Non-Blok sebagai bentuk komitmen pada prinsip bebas aktif. Secara keseluruhan, politik luar negeri Orde Baru menjadi instrumen penting bagi rezim untuk menopang legitimasi dan pembangunan. Namun, kebijakan ini juga menunjukkan kelemahannya, khususnya dalam penyelesaian isu Timor Timur yang akhirnya tidak dapat dipertahankan secara permanen di bawah kendali Indonesia.

**Daftar Pustaka**

- Arif, M. 2013. "Intervensi Militer Indonesia Di Timor Portugis 7 Desember 1975: Analisis Kebijakan Luar Negeri Pada Level Sistem Internasional ,Politik Domestik Dan Individu ." *Global Jurnal Politik Indonesia*: 195–215.
- Ayu, R., & Winarno, B. 2021. "Kegagalan Diplomasi Indonesia Dalam Mempertahankan Timor Timur Di Perserikatan Bangsa-Bangsa."
- Fibiger, M. 2020. "A Diplomatic Counter-revolution: Indonesian Diplomacy and the Invasion of East Timor." *Modern Asian Studies* ([Cambridge University Press & Assessment).
- fibiger, M. 2020. "A Diplomatic Counter-Revolution:Indonesia Diplomacy and the Invasion of East Timor." *modern asian studies*: 587–628.
- Kusuma, T., & Afwan, B. 2022a. "Upaya Membangun Stabilitas Nasional Pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (1967–1971)." *Swarnadwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya*: 42–56.
- Kusuma, T., & Afwan, B. 2022b. "Upaya Membangun Stabilitas Nasional Pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (1967–1971)." *Swarnadwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya*,: 42–56.
- Mangkusubroto, M. I. 2025. "Membangun Diplomasi Pertahanan Indonesia Pada Masa Perang Dingin Di Bawah Kepemimpinan Presiden Soekarno." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*.
- Pradana, H. A. 2016. "Persepsi Suharto Dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina Pada Awal Orde Baru." *Indonesian Perspective*.: 1–90.
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. 2023a. "Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB)." *Jurnal Lembannas RI*: 13–28.
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. 2023b. "Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non Blok. Jurnal." *Jurnal Lembannas RI*.